



RANCANGAN SURAT EDARAN MENDAGRI TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD TAHUN 2025-2029



Drs. Bob RF Sagala, M.Si

DITJEN BINA BANGDA - KEMENDAGRI

ARAHAN PENYUSUNAN RANTEK RPJMD TAHUN 2025-2029



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor :
Sifat : Satu berkas
Lampiran : Penyusunan Rancangan Teknokratik
Hal : RPJMD Tahun 2025-2029

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045,

dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Permerintah Daerah agar segera menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
- 2 Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah.
- 3 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan ketentuan, antara lain:
 - a. dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik
 - b. mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045
 - c. diselesaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun 2024, untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah
 - d. diunggah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- 4 Tata cara penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dalam lampiran surat ini.

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANTEK RPJMD TAHUN 2025-2029



Rantek RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disiapkan **sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik** sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

01



02



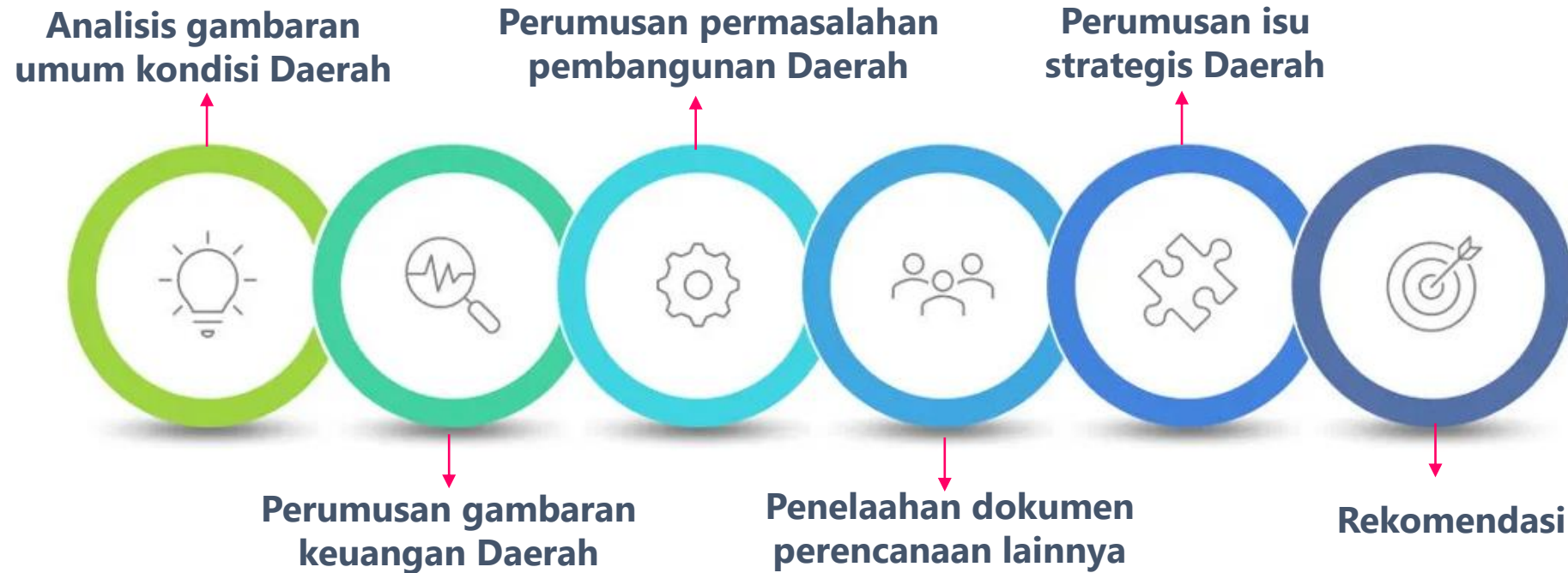
Rantek RPJMD Tahun 2025-2029 memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan

03

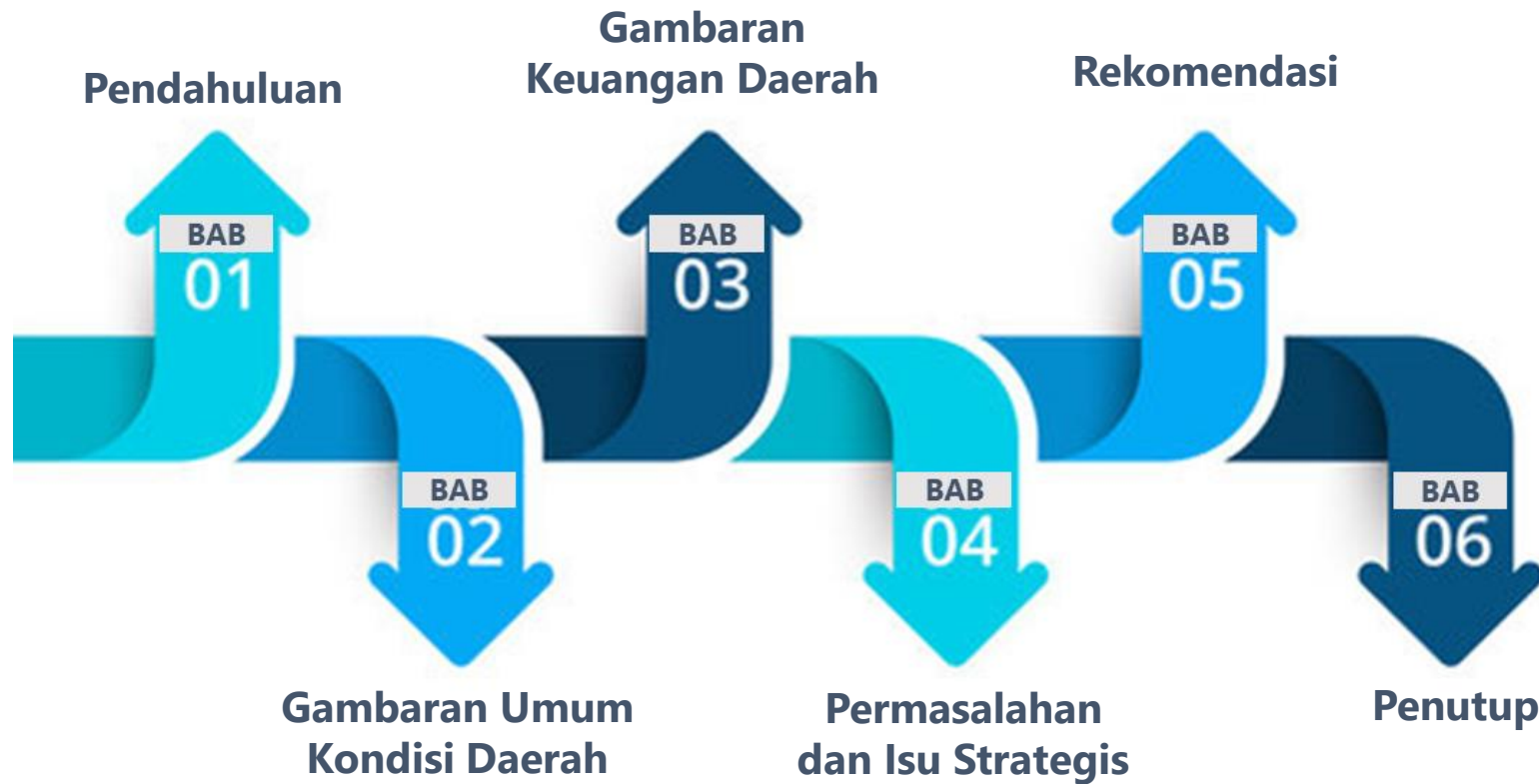


Rantek RPJMD menjadi masukan penyusunan RPJMD sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah

LINGKUP PENYUSUNAN RANTEK RPJMD TAHUN 2025-2029



SISTEMATIKA RANTEK RPJMD TAHUN 2025-2029



TATA CARA PENYUSUNAN RANTEK RPJMD TAHUN 2025-2029



01



Diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rantek RPJMD

02



Orientasi substansi perencanaan pembangunan daerah bagi Tim Penyusun Rantek RPJMD

03



Tim Penyusun menyusun Rantek RPJMD dengan pendekatan teknokratik

04



Tim Penyusun Rantek RPJMD membahas bersama dengan PD untuk mendapatkan masukan

05



Pembahasan Rantek RPJMD dapat melibatkan akademisi dan praktisi

06



Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan bertanggung jawab menyelesaikan Rantek RPJMD



TERIMA KASIH



1. Merumuskan latar belakang penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Menjelaskan secara singkat hubungan antara Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045* dengan RTRW serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.
4. Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Menampilkan sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Bab ini dilakukan dengan mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Analisis dilakukan sekurang-kurangnya dengan menggunakan data 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2019-2023). Penyajian pada Bab II memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Geografi dan Demografi

→ Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan karakteristik demografi

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

→ Menjelaskan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya

3. Aspek Daya Saing Daerah

→ Menjelaskan daya saing ekonomi daerah, kualitas infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia

4. Aspek Pelayanan Umum

→ Aspek ini menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menyajikan kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

Penyajian indikator rangkaian kinerja seperti yang disebutkan di atas atau indikator yang lainnya dapat memanfaatkan daftar indikator *outcome* yang dimuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Bab ini sekurang-kurangnya berisi tentang gambaran ringkas kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

1

Subbab permasalahan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan/signifikan

Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya

2

Subbab isu strategis daerah mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJPN 2025-2045, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, RPJPD 2025-2045, Laporan KLHS RPJMD, dan evaluasi kinerja dokumen perencanaan pembangunan menengah sebelumnya.

Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

1. Permasalahan
2. Isu strategis sesuai konteks
3. Potensi daerah

BAB V REKOMENDASI



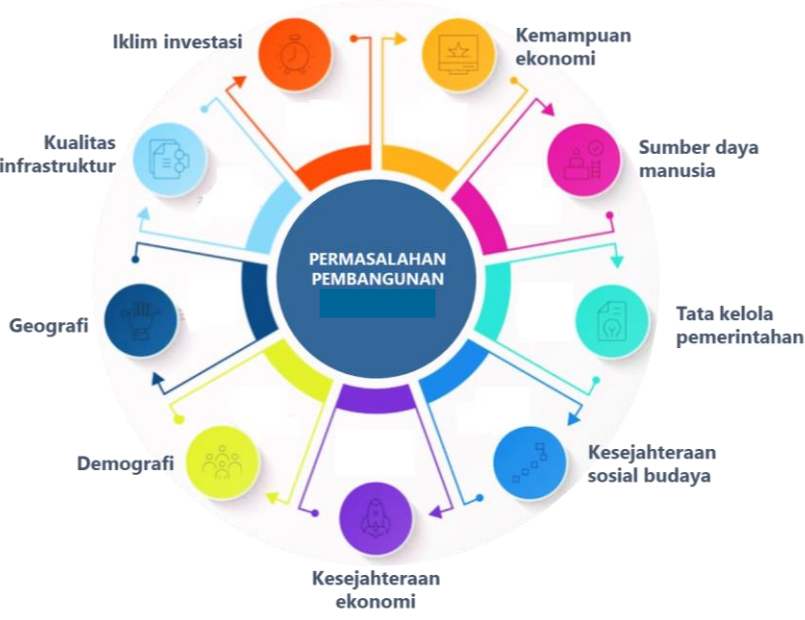
Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Tahun 2024, antara lain meliputi:

- 1** Rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga Tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta Rantek RPJMN Tahun 2025-2029 yang dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan visi calon kepala daerah
- 2** Rangkaian kerja yang seyogyanya dikerjakan selama 5 (lima) tahun sebagai upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan rangkaian kerja dimaksud, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rantek RPJMN Tahun 2025-2029. Rangkaian kerja tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk misi sampai dengan program prioritas/unggulan calon kepala daerah
- 3** Lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW

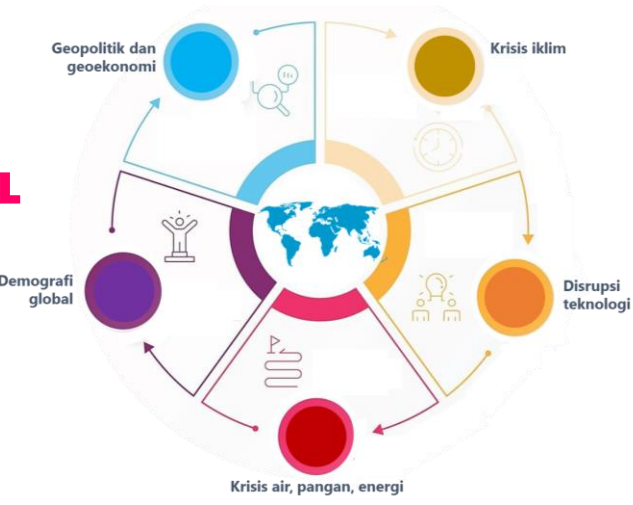
CONTOH PERUMUSAN MASALAH DAN ISU (1)



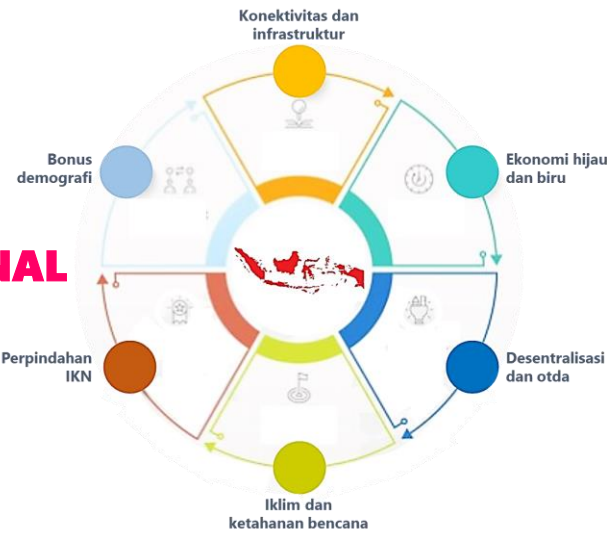
MASALAH



ISU GLOBAL



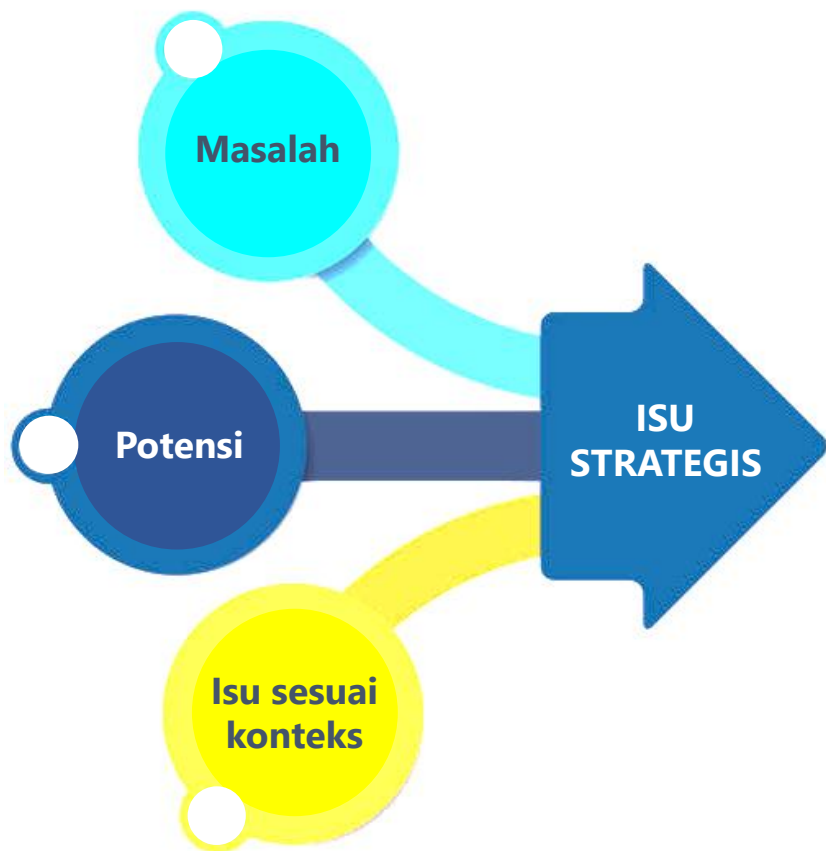
ISU NASIONAL



ISU REGIONAL



CONTOH PERUMUSAN MASALAH DAN ISU (2)



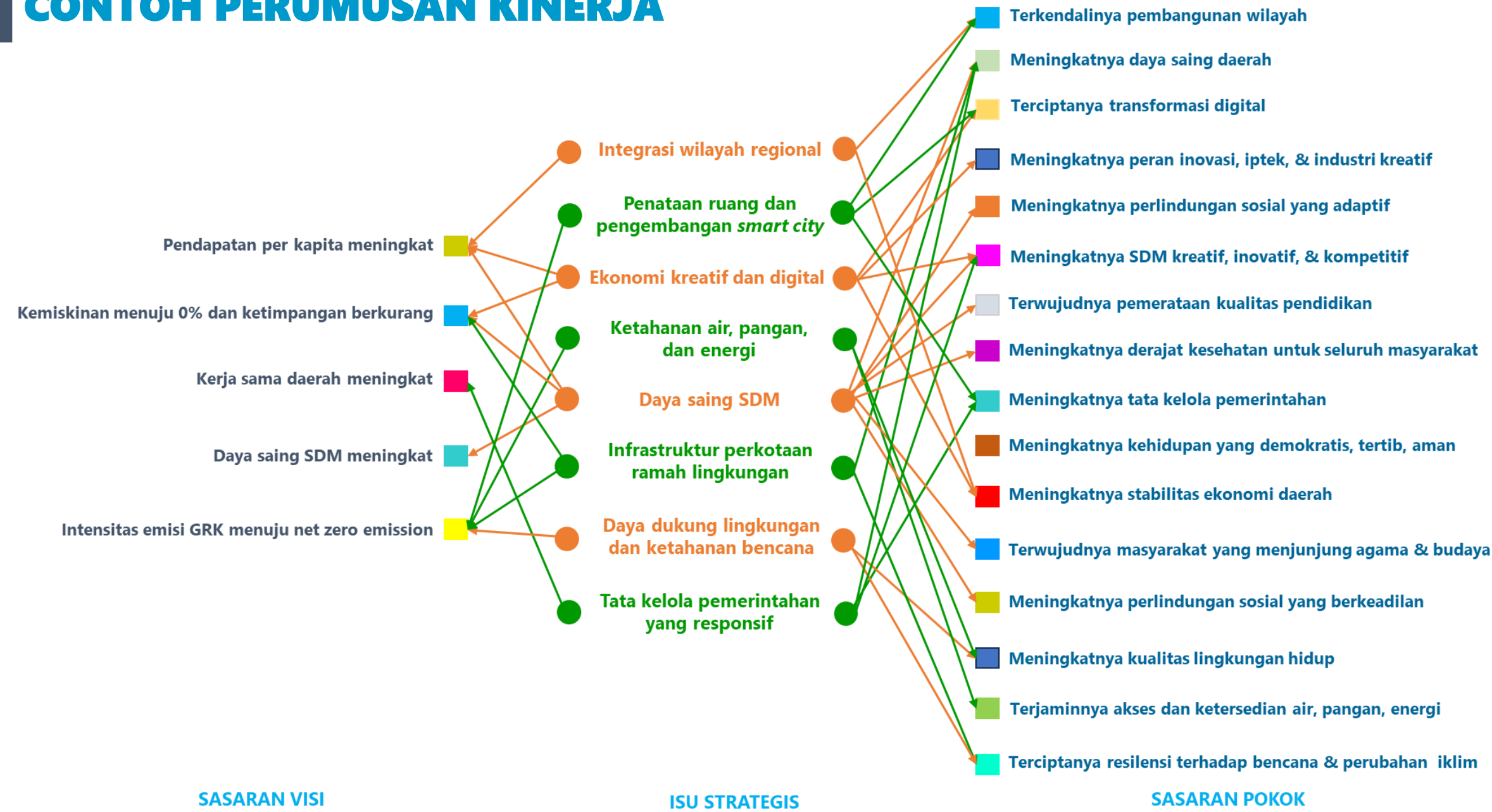
- 01 Integrasi wilayah regional
- 02 Penataan ruang dan pengembangan *smart city*
- 03 Ekonomi kreatif dan digital
- 04 Ketahanan air, pangan dan energi



- 05 Daya saing SDM
- 06 Infrastruktur perkotaan ramah lingkungan
- 07 Daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana
- 08 Tata kelola pemerintahan yang responsif



CONTOH PERUMUSAN KINERJA



SASARAN VISI

ISU STRATEGIS

SASARAN POKOK

CONTOH PERUMUSAN KERJA



Arah Kebijakan RPJPD

Rekomendasi Kinerja

Indikasi Intervensi Rantek
RPJMN 2025-2029

CONTOH PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS

